

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat



2010-2016



*Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung Barat*

**Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bandung Barat**



2010-2016

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BANDUNG BARAT
MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2010 - 2016**

Nomor ISSN : -
Nomor Publikasi : 3217.1703
Nomor Katalog BPS : 9302003.3217
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : 59 halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat

Dicetak Oleh:
CV. Nugraha

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2010 - 2016 ini dapat diselesaikan. Penyusunan publikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi informasi indikator makro ekonomi yang telah disusun sebelumnya yaitu berupa PDRB Kabupaten Bandung Barat menurut Lapangan Usaha Tahun 2016. PDRB menurut pengeluaran ini dapat memberikan gambaran fenomena ekonomi tentang perilaku masyarakat, pemerintah dan investasi (fisik) di Kabupaten Bandung Barat tahun 2016. Selain itu dapat juga diperoleh informasi tentang surplus atau defisitnya neraca perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah.

PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2010 - 2016 masih bersifat studi dan diakui bahwa dalam penyusunannya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penulisan berikutnya.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan dijadikan rujukan dalam penentuan kebijakan pembangunan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung Barat, September 2017
**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung Barat**



Ir. Hj. Sri Dady
NIP. 19591107 198503 2 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Lampiran	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Cakupan	3
BAB II METODOLOGI	
2.1. Penghitungan Konsumsi Rumah Tangga	8
2.1.1 Konsep	8
2.1.2 Cakupan	9
2.1.3 Klasifikasi	10
2.1.4 Sumber Data	11
2.1.5 Metode Penghitungan	11
2.2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11
2.2.1 Konsep	11
2.2.2 Cakupan	15
2.2.3 Klasifikasi	15
2.2.4 Sumber Data	18
2.2.5 Metode Estimasi	18
2.3. Penghitungan Konsumsi Pemerintahan	20
2.3.1 Konsep	20
2.3.2 Cakupan	20
2.3.3 Klasifikasi	21
2.3.4 Sumber Data	21
2.3.5 Metode Estimasi	21
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	21
2.4.1 Konsep	21
2.4.2 Cakupan	22
2.4.3 Klasifikasi	22
2.4.4 Sumber Data	27
2.4.5 Metode Estimasi	27

	Hal
2.5. Perubahan Stok	29
2.5.1 Konsep	29
2.5.2 Cakupan	29
2.5.3 Klasifikasi	29
2.5.4 Sumber Data	30
2.5.5 Metode Estimasi	30
2.6. Ekspor dan Impor	32
2.6.1 Konsep	32
2.6.2 Cakupan	32
2.6.3 Klasifikasi	33
2.6.4 Sumber Data	33
2.6.5 Metode Estimasi	34
BAB III	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	
KABUPATEN BANDUNG BARAT	
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2016	
3.1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran	36
3.2. Struktur Pengeluaran	41
3.3. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran	43

LAMPIRAN

	Hal
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2016 (Juta Rp)	48
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2016 (Juta Rp)	49
Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2016 (Persen)	50
Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2016 (Persen)	51
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2016 (Persen)	52
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2016 (Persen)	53
Tabel 7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2016	54
Tabel 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2016	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian. Pembangunan ekonomi tidak hanya ditekankan pada pertumbuhan ekonomi semata, namun hal yang lebih esensial adalah diikuti oleh distribusi pendapatan masyarakat. Dengan mengoptimalkan potensi dan kapasitas perekonomian diharapkan pembangunan mampu menyerap sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah yang tinggi sehingga terwujud kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Pembangunan harus lebih ditingkatkan secara bersamaan antara pertumbuhan dengan pemerataan ekonomi, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat agar dapat memenuhi segala kebutuhannya.

Selain itu dalam konteks pembangunan regional, investasi juga memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus berupaya keras mendorong agar investasi dapat masuk ke daerahnya. Yang menjadi persoalan adalah investasi tidak selalu datang ke setiap daerah. Hanya daerah yang memiliki daya saing investasi yang baik yang akan mendapatkan peluang investasi yang lebih besar.

Diakui bahwa, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut di atas masih banyak kendala yang harus dihadapi baik internal maupun eksternal. Kondisi internal yang mempengaruhi percepatan pembangunan antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu terus ditingkatkan kualitasnya dalam mengelola potensi wilayah, sedangkan kondisi eksternal diantaranya pengaruh situasi dan kondisi perekonomian, politik, keamanan nasional dan global terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat.

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan

sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator makro tersebut diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu dan juga dapat menggambarkan struktur ekonomi wilayah.

Selama ini Kabupaten Bandung Barat sudah melakukan penyusunan PDRB Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan pendekatan dari sisi produksi (*production approach*). PDRB dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi memberikan gambaran tentang jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari keseluruhan kegiatan ekonomi di suatu daerah. Pada tahun ini BPS Kabupaten Bandung Barat juga melakukan studi Penyusunan PDRB yang dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). PDRB dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi tersebut untuk memenuhi permintaan akhir. Kebutuhan di dalam wilayah domestik dapat berupa kebutuhan untuk konsumsi akhir (baik rumah tangga, lembaga nirlaba maupun pemerintah) dan kebutuhan investasi yang tercermin dari pembentukan barang modal tetap (PMTB). Hal yang tak kalah penting adalah informasi mengenai tingkat ketergantungan suatu wilayah terhadap wilayah lain yang tercermin dari ekspor dan impor barang/jasa.

1.2. Maksud dan Tujuan

Atas dasar pertimbangan di atas dan dalam konteks upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat secara lebih komprehensif maka secara khusus penting untuk melaksanakan Studi Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2016. Tujuan penyusunan publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran fenomena perekonomian secara makro tentang perilaku konsumsi masyarakat, pemerintah dan investasi (fisik). Selain itu dapat diperoleh informasi tentang surplus atau defisitnya neraca perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2016. Secara rinci pada publikasi ini akan memuat beberapa analisis mengenai :

-
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui pendekatan pengeluaran atau menurut penggunaan tahun 2016 pada tingkat kabupaten.
 2. Distribusi menurut jenis pengeluaran
 3. Laju pertumbuhan menurut jenis pengeluaran.

1.3 . Cakupan

Penyusunan Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2016 ini memiliki tiga cakupan diantaranya cakupan waktu dan wilayah. Adapun cakupan waktu yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah selama tahun 2014 – 2016 dan cakupan wilayahnya adalah wilayah Kabupaten Bandung Barat.

BAB II METODOLOGI

Pada dasarnya penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu : pendekatan produksi (*Production Approach*), pendekatan pendapatan (*Income Approach*) dan pendekatan pengeluaran (*Expenditure Approach*).

Pendekatan produksi dilakukan bila tersedia data produksi dari masing-masing sektor. Nilai tambah (*value added*) barang dan jasa yang diproduksi dihitung dengan cara mencari selisih nilai produksi (*output*) dengan biaya antara (*intermediate Cost*). Nilai tambah tersebut akan sama dengan balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Pendekatan ini umumnya digunakan terhadap kegiatan-kegiatan produksi yang berbentuk barang/komoditi seperti sektor pertanian, pertambangan, penggalian dan industri.

Pendekatan pendapatan adalah dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor-faktor produksi (upah/gaji, surplus usaha) termasuk juga penyusutan dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Di dalam surplus usaha termasuk bunga modal neto (selisih bunga yang diterima dengan bunga yang dibayarkan) sewa tanah dan keuntungan (profit). Di dalam sektor-sektor yang tidak mencari untuk (*non profit making*) termasuk sektor pemerintahan, surplus usahanya tidak diperhitungkan, karena outputnya berupa pelayanan kepada masyarakat yang produksinya jasa (sektor pemerintahan). Hal tersebut dilakukan karena tidak tersedianya/kurang lengkapnya data produksi dan biaya antara.

Pendekatan pengeluaran adalah dengan cara menghitung pengeluaran konsumsi akhir dari barang-barang dan jasa yang diproduksi. Secara makro pengeluaran akhir dari barang/jasa tersebut digunakan untuk :

- a. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga.

-
- b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta yang Tidak Mencari Untung (Lembaga Nirlaba).
 - c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.
 - d. Pembentukan Modal Tetap Bruto.
 - e. Perubahan Stok.
 - f. Ekspor Neto (Ekspor-Impor).

Dalam publikasi ini penghitungan PDRB yang akan dibahas adalah penghitungan dengan pendekatan pengeluaran/penggunaan.

Pada dasarnya penghitungan PDRB tersebut dapat mencerminkan suatu perkembangan atau perubahan harga dan riil.

(1) Perubahan Harga

Yaitu kenaikan/penurunan perekonomian yang diakibatkan oleh perubahan harga yang terjadi di pasar. Pada umumnya harga tersebut cenderung menaik sehingga pendapatan regional atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun selalu menunjukkan kenaikan.

(2) Perubahan Riil

Yaitu kenaikan/penurunan perekonomian yang dihitung berdasarkan perubahan riil, artinya tidak termasuk lagi perubahan harga. Pengertian yang umum digunakan para ekonom yaitu pendapatan yang telah dihilangkan pengaruh inflasinya. Pendapatan regional atas dasar harga berlaku yang telah dikurangi dengan perkembangan inflasi dikenal dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Pendapatan regional yang terakhir inilah pada umumnya banyak dimanfaatkan oleh para birokrat, peneliti dan para ekonom.

Penghitungan PDRB menurut pengeluaran, disajikan dalam 2 (dua) bentuk :

1. Atas dasar harga berlaku (*at current price*)
2. Atas dasar harga konstan/tetap (*at constant price*).

Dari kedua penyajian tersebut, terdapat perbedaan antara lain :

- a. Penyajian atas dasar harga yang berlaku, menunjukkan agregat pendapatan dinilai menurut harga yang terjadi di pasar, baik untuk menilai produksi maupun biaya antara. Termasuk juga penyajian PDRB menurut pengeluaran (konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor neto).
- b. Penyajian atas dasar harga konstan, yaitu agregat pendapatan yang dinilai menurut harga konstan/tetap. Baik produksi maupun biaya antara dinilai menurut harga tahun dasar, sehingga akan menunjukkan perkembangan agregat pengeluaran secara riil dari tahun ke tahun.

PDRB menurut pengeluaran menggambarkan pengeluaran barang dan jasa yang di produksi oleh berbagai sektor dalam masyarakat. Pengeluaran PDRB tersebut secara garis besar ada dua macam yaitu : Konsumsi Antara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi dan Konsumsi Akhir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Untuk melihat hubungan antara pendapatan dan permintaan terhadap barang dan jasa dapat ditulis sebagai berikut :

**PDRB SAMA DENGAN SELURUH PENGELUARAN AKHIR DIKURANGI
DENGAN NILAI TOTAL IMPOR**

Pengeluaran akhir merupakan pembelian dari semua barang dan jasa (barang konsumsi, output pemerintah dan lembaga pemerintah non profit, barang modal, perubahan persediaan, semua barang yang di ekspor) yang di suplai dalam suatu perekonomian. Nilainya akan melebihi dari output yang di produksi oleh sektor-sektor produksi domestik sebesar impor barang dan jasa. Nilai produksi domestik akan diperoleh dari sisi pengeluaran akhir dengan total impor, yang persamaannya dapat ditulis :

$$Y = C_h + C_n + C_g + I_i + I_s + X - M \quad \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

- Ch ; Konsumsi Rumah Tangga (*Household*)
- Cn : konsumsi Lembaga Swasta Non Profit (*Non Profit Institution*)
- Cg : Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan (*Government*)
- Ii : Pembentukan Modal Tetap Bruto (*Investasi*)
- Is : Perubahan stok (*Capital Stock*)
- X : Ekspor
- M : Impor
- Y : PDRB

Dari persamaan (1) dapat disederhanakan menjadi :

$$Y = C + I + X - M \quad \dots\dots\dots (2)$$

Di mana :

- C : Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR),
Pemerintah dan Pertahanan
- I : Investasi
- X : Ekspor
- M : Impor

2.1. Penghitungan Konsumsi Rumah Tangga

2.1.1. Konsep

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya

kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993). Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

2.1.2. Cakupan

PK-RT mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik penduduk yang bersangkutan. Barang dan jasa yang dikonsumsi antara lain dalam bentuk :

- makanan dan minuman, baik bahan makanan maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;
- barang tahan lama, seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- jasa-jasa, seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transport, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket tempat rekreasi, ongkos pembantu rumah tangga;
- barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- barang dan jasa yang dibeli secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk di luar wilayah atau di luar negeri termasuk sebagai konsumsi rumah tangga dan diperlakukan sebagai transaksi impor; sedangkan pembelian langsung oleh bukan penduduk di suatu wilayah diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah yang bersangkutan (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak ada duplikatnya (tidak diproduksi kembali), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lain diperlakukan sebagai investasi barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

Diperhitungkannya nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa sewa rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang diperhitungkan adalah ongkos sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga tidak termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh pengeluaran yang dimaksud antara lain adalah pembelian barang dan jasa

untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Demikian halnya pengeluaran rumah tangga untuk keperluan transfer dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.1.3. Klasifikasi

Pengeluaran konsumsi pada dasarnya terdiri dari konsumsi kelompok makanan dan non makanan. Berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh institusi rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam 12 (dua belas) kelompok COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*), yaitu:

1. Makanan dan Minuman Tidak Beralkohol
2. Minuman Beralkohol, Tembakau dan Narkotik
3. Pakaian dan Alat Kaki
4. Perumahan, Air, Listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, Perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi

9. Rekreasi/hiburan dan Kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

2.1.4. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi besarnya PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas; BPS), dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu (sebulan) untuk kelompok makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Banyaknya penduduk tahunan,
- Data Sekunder (baik dari BPS maupun luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu.
- IHK

2.1.5. Metode penghitungan

Total pengeluaran konsumsi rumah tangga keseluruhan diperoleh dari pengeluaran perkapita setahun dikalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkiraan pengeluaran konsumsi rumah tangga diperoleh dari hasil Susenas/Suseda. Pengeluaran konsumsi rumahtangga atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan membagi pengeluaran atas dasar harga berlaku dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

2.2.1. Konsep

Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP) secara keseluruhan. Sesuai dengan fungsinya LNP terdiri dari LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan

rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud LNPRT adalah lembaga yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada harga yang tidak berarti secara ekonomi kepada anggotanya atau rumahtangga dan tidak dikontrol oleh pemerintah. Harga yang tidak berarti secara ekonomi adalah harga yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang produsen ingin sediakan dan pada jumlah yang pembeli ingin beli.

Ciri-ciri unit lembaga nonprofit adalah sbb:

- ❖ lembaga nonprofit umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- ❖ pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga;
- ❖ setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- ❖ kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- ❖ istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis

Klasifikasi Jenis LNP menurut Sektor Institusi

Jenis LNP	Sektor Kelembagaan
1. LNP yang menyediakan jasa ke korporasi (biasanya beranggotakan perusahaan)	Korporasi
2. LNP yang dikontrol pemerintah dan menyediakan jasa individu atau kolektif berbasis non-pasar.	Pemerintahan
3. LNP yang menyediakan barang dan jasa ke rumahtangga dalam harga yang berarti secara ekonomi	Korporasi

4. LNP yang menyediakan jasa ke rumahtangga secara gratis atau dalam harga yang tidak berarti secara ekonomi	Lembaga Non-Profit Rumahtangga (LNPRT)
5. LNP yang menyediakan jasa kolektif secara gratis atau dalam harga yang tidak berarti secara ekonomi	Lembaga Non-Profit Rumahtangga (LNPRT)

a. LNP yang menyediakan jasa bagi korporasi

Kelompok LNP ini mencakup LNP yang menyediakan jasa bagi korporasi dengan pungutan biaya (iuran) dalam menutup biaya penyediaan jasa yang dimaksud. Tingkat biaya atau harga keanggotaan termasuk dalam kriteria harga yang berarti secara ekonomi (*economically significant price*). Jasa yang dihasilkan biasanya dijual pada anggota, dan diperlakukan sebagai konsumsi antara. LNP semacam ini umumnya dalam bentuk asosiasi yang menyediakan jasa khususnya bagi anggota. Sebagian besar LNP didirikan oleh korporasi yang dirancang untuk kepentingan promosi. Contoh : kamar dagang, asosiasi produsen pertanian, manufaktur atau perdagangan, organisasi pengusaha penelitian dan pengujian laboratorium atau organisasi lain, atau lembaga yang terlibat dalam aktivitas untuk kepentingan umum atau bermanfaat bagi kelompok yang mengontrol keuangannya.

b. LNP yang dikontrol oleh pemerintah

Kelompok LNP ini mencakup LNP yang dikontrol oleh pemerintah dan menjual jasanya pada tingkat harga yang berbasis non-market, yaitu pada tingkat harga yang tidak didasarkan atas biaya produksi. Bahkan terkadang jasa layanan diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Kontrol atas LNP didefinisikan sebagai kemampuan untuk menentukan kebijakan dan program lembaga. Dalam menentukan apakah suatu LNP dikontrol pemerintah, ada lima indikator yang harus dipertimbangkan sbb :

Penunjukan petugas, pemerintah berhak menunjuk petugas pengelola LNP berdasarkan konstitusi, anggaran dasar, atau instrumen lain

Instrumen lain, instrumen yang berisi ketentuan selain penunjukkan petugas yang memungkinkan pemerintah menentukan aspek penting dari kebijakan umum atau program LNP

Perjanjian kontrak, keberadaan perjanjian kontrak antara pemerintah dan LNP ini memungkinkan pemerintah menentukan aspek kunci dari kebijakan umum atau program LNP

Tingkat pembiayaan, LNP yang utamanya dibiayai oleh pemerintah dapat dikontrol oleh pemerintah. Secara umum, jika LNP dapat menentukan kebijakan atau program yang berarti sepanjang garis yang tersebut pada indikator sebelumnya, maka tidak dianggap dikontrol oleh pemerintah

Ekposur risiko, jika pemerintah secara terbuka dimungkinkan untuk terkena semua atau sebagian besar risiko finansial terkait dengan aktivitas LNP, maka pengaturan tersebut merupakan kontrol.

c. LNP yang menyediakan barang dan jasa ke rumahtangga

Kelompok LNP ini dapat dibedakan atas :

LNP yang menyediakan barang dan jasa ke rumahtangga dengan tingkat harga yang berarti secara ekonomi. Output LNP merupakan pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga.

LNP yang menyediakan jasa ke rumahtangga secara gratis atau dengan tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi (non-komersial). Output LNP ini merupakan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dan pengeluaran akhir aktual rumahtangga.

LNP yang menyediakan jasa kolektif secara gratis atau dengan tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Output LNP ini merupakan pengeluaran konsumsi akhir aktual LNPRT. Jasa kolektif biasanya dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, contoh hasil penelitian LNPRT yang dapat diakses setiap orang, administrasi publik baik tingkat nasional maupun daerah, dll. Di dalam teori ekonomi, jasa kolektif disebut sebagai barang publik (public goods).

Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah tangga (PKLNPRT)

Nilai PKLNPRT adalah sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung dari penjumlahan pengeluaran LNPRT dalam melakukan kegiatan. Pengeluaran tersebut terdiri dari:

a. Konsumsi antara

Contoh: Pembelian alat tulis, biaya foto copy, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, telex, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, biaya administrasi bank, biaya transportasi, bahan bakar, biaya perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lainnya, biaya sewa gedung, biaya sewa perlengkapan kantor dll.

b. Kompensasi pegawai

Contoh: Upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.

c. Penyusutan

d. Pajak Produksi lain (dikurangi subsidi): Contoh: PBB, STNK, BBN dll.

2.2.2. Cakupan

Lingkup LNP yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT).

2.2.3. Klasifikasi

Lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) bentuk organisasi yaitu: organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi sosial (Orsos), organisasi profesi (Orprof), perkumpulan sosial/kebudayaan/olah raga/hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

a. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi, dan terdiri dari:

- ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ICMI,
- ormas kepemudaan, seperti KNPI, HMI, Pemuda Pancasila,
- ormas wanita, seperti Fatayat, Kalyana Mitra Wanita, dan
- ormas lainnya seperti Kosgoro, Partai Politik, dan Pepabri.

b. Organisasi Sosial (Orsos)

Organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, dan terdiri dari panti asuhan, panti wreda, panti lainnya, seperti yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tuna netra, dan sejenisnya.

c. Organisasi Profesi (Orprof)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sebagai wahana pengabdian masyarakat, dan terdiri dari:

- Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Sosial, seperti: ISEI, Ikatan Akuntan Indonesia, dan sejenisnya.
- Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Pasti, seperti PII, IDI, dan sejenisnya.

d. Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat mengembangkan kemampuan/apresiasi budaya, olahraga, hobi, kegiatan yang bersifat sosial, dan terdiri dari:

- Perkumpulan sosial seperti Perkumpulan Rotari Indonesia, WIC;

-
- Organisasi Kebudayaan seperti Padepokan Seni dan Budaya, Himpunan Penghayat Kepercayaan;
 - Organisasi Olahraga seperti PSSI, PBSI, Ikatan Motor Indonesia; dan
 - Organisasi Hobi seperti Ikatan Penggemar Anggrek, ORARI, dan Wanadri.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar kemandirian atau swadaya, dan terdiri dari:

- LSM Penyebar Informasi seperti PKBI, YLKI, Walhi;
- LSM Pendidikan dan Pelatihan seperti LP3ES, Yayasan Bina Swadaya;
- LSM Konsultasi dan Advokasi seperti YLBHI;
- LSM Penelitian dan Studi Kebijakan seperti Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI);

f. Lembaga Keagamaan

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan, mensyiarkan agama, dan terdiri dari:

- Organisasi Islam, seperti Lembaga Dakwah, Remaja Masjid, Majelis Taklim;
- Organisasi Kristen/Protestan, seperti PGI, KWI, HKBP;
- Organisasi Hindu/Budha seperti Walubi, Parisadha Hindu Dharma;
- Perkumpulan Jamaah Masjid;
- Perkumpulan Jemaat Gereja/tempat ibadah lain;
- Pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya.

g. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa

Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan kepada korban bencana atau penerima beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta sesama, solidaritas, dan terdiri dari:

- Lembaga Bantuan Kemanusiaan, seperti Yayasan Kesejahteraan Gotong Royong, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat;
- Lembaga Bantuan Pendidikan seperti GNOTA, Yayasan Supersemar;
- Lembaga Bantuan Lainnya

2.2.4. Sumber data

Sumber data untuk menghitung PKLNPRT tahunan adhb terdiri dari:

- Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis input pengeluaran.
Data ini berasal dari Survei Khusus Lembaga Non-profit dengan sampling unit LNPRT.
- Populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
Populasi LNPRT menurut jenis lembaga dapat diperoleh dari Kesbanglinmas setempat, Dinas Pemuda dan Olahraga, Departemen agama dan kantor lain yang mempunyai informasi mengenai jumlah organisasi di wilayahnya.

2.2.5. Metode Estimasi

Dengan asumsi tidak ada kegiatan ekonomis produktif yang dilakukan lembaga, maka nilai PKLNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan lembaga dalam rangka melakukan kegiatan layanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi (antara) ditambah biaya primer (upah & gaji pegawai, penyusutan barang modal, dan pajak tak langsung). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang/jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian

pihak lain (transfer). Jika lembaga menggunakan *input* yang diperoleh secara cuma-cuma dari pihak lain, maka nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku.

Estimasi PKLNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan metode langsung. Metode ini didasarkan pada data hasil survei khusus lembaga nonprofit rumah tangga (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata PKLNPRT menurut kode lembaga dan input
 Nilai rata-rata ini diperoleh dari SKLNP yang dilaksanakan setiap tahun, namun sampel survey relatif sedikit sehingga dapat digunakan pendekatan dengan cara menggunakan data SKLNP propinsi Jawa Barat yang karakteristik LNPRT-nya mirip dengan kabupaten. Rumus rata-rata per lembaga menurut jenis pengeluaran dari hasil survey:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata PKLNPRT menurut kode lembaga dan input

x_{ij} : PKLNPRT hasil survey menurut kode lembaga dan input

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut kode lembaga

i : Kode lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Input LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Estimasi PKLNPRT

Setelah mendapatkan nilai rata-rata PKLNPRT menurut kode lembaga dan input dari hasil survey dan populasi LNPRT menurut kode lembaga, maka estimasi PKLNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT adhb

N_i : Populasi LNPRT menurut kode lembaga

Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 sesuai dengan kegiatan masing-masing sebidangnya, seperti penghitungan menurut lapangan usaha yaitu metode *deflasi* dengan menggunakan indeks jumlah unit kegiatan atau indeks jumlah tenaga kerja.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

2.3.1. Konsep

Pengeluaran konsumsi pemerintahan didefinisikan sebagai nilai output atas pelayanan pemerintah dikurangi dengan nilai penjual barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang kegiatannya yang tidak dapat dipisahkan. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sama dengan nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsinya pada saat itu. Output pemerintah tidak dijual sehingga nilainya diukur dengan biaya produksinya, yaitu jumlah konsumsi antara, konsumsi pegawai, konsumsi modal tetap dan pajak tak langsung.

2.3.2. Cakupan

Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa) yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Pengeluaran pemerintah yang dicakup adalah :

1. Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah kabupaten.
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah pusat yang menjadi bagian dari pemerintah kabupaten
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari pemerintah kabupaten
4. Pengeluaran konsumsi seluruh pemerintah desa dalam kabupaten.

2.3.3. Klasifikasi

Nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sendiri oleh pemerintahan tidak dapat diperoleh secara langsung karena itu untuk memperoleh nilainya diperkirakan dari besarnya biaya produksi yang dikeluarkan.

2.3.4. Sumber Data

1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) II Bandung untuk memperoleh data APBN
2. Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat untuk memperoleh data keuangan APBD dan kepegawaian.
3. BPS Kabupaten Bandung Barat untuk memperoleh data keuangan desa (K3)

2.3.5. Metode Estimasi

Penghitungan konsumsi pemerintahan menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa yang di peroleh dari K.2 dan K.3 serta alokator dari pengeluaran pemerintahan Pusat dan Provinsi.

Pengeluaran konsumsi pemerintah = output non pasar yang dikonsumsi sendiri – penjualan barang dan jasa

Untuk memperkirakan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dilakukan pendekatan sebagai berikut :

- 1). *Ekstrapolasi* belanja pegawai dengan indeks jumlah pegawai.
- 2). *Deflasi* belanja barang dengan IHPB tanpa ekspor pada tahun yang sesuai.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

2.4.1. Konsep

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meliputi seluruh pengeluaran untuk unit produksi yang menambah daya produksi aktiva tetap kurang dengan penjualan dari barang-barang modal bekas.

Secara rinci, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terdiri dari :

- a). penambahan bersih (baru atau bekas) oleh produsen, asset berwujud yang dapat diproduksi kembali yang mempunyai umur satu tahun atau lebih.
- b). Pengeluaran atas peningkatan perubahan barang-barang modal yang diharapkan memperpanjang umur barang tersebut atau dapat meningkatkan produktivitasnya.
- c). Pengeluaran atas reklamasi tanah dan perbaikannya, pengembangan dan perluasan perkebunan, pertambangan, hutan, lahan pertanian dan perikanan .
- d). Penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil tenaga, susu, bulu, dan pembibitan ternak potong.

Pembentukan Modal Tetap Bruto dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha/sector

2.4.2. Cakupan

Secara rinci, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terdiri dari :

- a). penambahan bersih (baru atau bekas) oleh produsen, asset berwujud yang dapat diproduksi kembali yang mempunyai umur satu tahun atau lebih.
- b). Pengeluaran atas peningkatan perubahan barang-barang modal yang diharapkan memperpanjang umur barang tersebut atau dapat meningkatkan produktivitasnya.
- c). Pengeluaran atas reklamasi tanah dan perbaikannya, pengembangan dan perluasan perkebunan, pertambangan, hutan, lahan pertanian dan perikanan .
- d). Penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil tenaga, susu, bulu, dan pembibitan ternak potong.

Pembentukan Modal Tetap Bruto dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha/sector

2.4.3. Klasifikasi

Secara umum pengklasifikasian barang modal dapat dilakukan menurut 4 penggolongan, antara lain : menurut jenis barang, menurut lapangan usaha, menurut

institusi, dan menurut wilayah asal.

A. Klasifikasi Menurut Jenis Barang.

Pengklasifikasian menurut jenis barang ini akan menjadi bentuk laporan PMTB triwulanan. Klasifikasi barang modal menurut jenis dibagi menjadi 4 kelompok besar antara lain: **bangunan, mesin, peralatan transportasi, dan lainnya**. Adapun rincian barang yang tercakup antara lain:

1. Bangunan

- a) **Bangunan tempat tinggal**; meliputi penyiapan lahan tempat tinggal, konstruksi gedung tempat tinggal, serta instalasi perlengkapan bangunan tempat tinggal.
- b) **Bangunan bukan tempat tinggal**; terdiri dari penyiapan lahan, konstruksi, dan instalasi bangunan. Jenis-jenis bangunan bukan tempat tinggal antara lain: gedung perkantoran, bangunan industri, gedung pusat perbelanjaan, gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung penginapan, gedung tempat hiburan dan bangunan untuk rekreasi.
- c) **Prasarana Pertanian**; Meliputi bangunan yang digunakan untuk menunjang pertanian seperti bangunan pengairan.
- d) **Jalan & jembatan**; Terdiri dari bangunan jalan raya, jalan kereta api, jembatan, tanggul, landasan pesawat, dan bangunan dermaga.
- e) **Instalasi Listrik, Air, Gas & Komunikasi**; Meliputi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air bersih, air limbah dan drainase, bangunan elektrikal, konstruksi telekomunikasi, sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, konstruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, konstruksi elektrikal dan telekomunikasi lainnya, pembuatan/pegeboran sumur air tanah, instalasi listrik bangunan sipil, instalasi navigasi laut dan sungai, instalasi navigasi

udara, intalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, dan instalasi telekomunikasi.

- f) **Instalasi Pipa Gas dan Minyak;** Meliputi Bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan minyak & gas.
- g) **Konstruksi lainnya;** terdiri dari pengerukan sungai, pembuatan taman kota, instalasi meteorologi dan geofisika, mercusuar, konstruksi pengeboran lepas pantai, dan lainnya.

2. **Mesin;** terdiri dari:

- a) **Mesin pembangkit & penggerak mula;** Meliputi mesin motor penggerak mula seperti mesin uap, turbin gas, turbin air, motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, motor listrik, mesin pengubah arus, mesin pengubah tegangan, generator, dan sejenisnya,.
- b) **Mesin dan perlengkapannya;** mesin pertanian, mesin-mesin untuk industri, mesin cetak, mesin penjilidan, mesin pengolahan dan pengerjaan kayu, mesin metalurgi, mesin untuk pertambangan, penggalian dan kontruksi, dll.
- c) **Mesin pengolah data** seperti komputer, mesin hitung elektronik, *cash*
- d) *register*, dan sejenisnya.
- e) **Peralatan elektronik;** terdiri dari berbagai peralatan listrik untuk rumahtangga, peralatan kedokteran, alat rekaman suara, gambar dan sejenisnya, tabung dan katup elektronik, dan lainnya.
- f) **Peralatan komunikasi;** telepon, pemancar radio/televisi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitter, peralatan faksimili, kamera televisi, dan berbagai alat transmisi lainnya.
- g) **Peralatan listrik lainnya;** lampu ultra violet, dsb.

3. **Peralatan Transportasi;**

- a) **Kendaraan bermotor roda 2 & 3;** misal: motor, bemo, mobet, dsb.
- b) **Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih;** meliputi kendaraan untuk penumpang maupun untuk industri.
- c) **Kereta api,** termasuk juga kereta api yang tidak mengangkut penumpang.
- d) **Kapal laut;** terdiri dari bermacam-macam kapal dan perahu baik yang bermotor maupun tidak.
- e) **Pesawat terbang;** termasuk helikopter, pesawat penumpang dan barang.
- f) **Kendaraan dan alat angkut lainnya;** mencakup sepeda dan becak, trolley, gerobak, delman, kereta dorong, dan lainnya.

4. **Barang Modal Lainnya,** yang dikelompokkan menjadi : Aset tak berwujud, *cultivated asset*, dan lainnya.

- a) Aset tak berwujud terdiri dari : Eksplorasi mineral, perangkat lunak, Barang seni & Literatur adalah produksi yang asli dari kekayaan intelektual, Aset tak berwujud lainnya; seperti hak cipta, hak paten, waralaba, merk dagang, dsb.
- b) *Cultivated Asset* terdiri dari : Ternak besar, ternak kecil, tumbuhan menghasilkan.
- c) Lainnya terdiri dari : Barang-barang dari kayu, rotan dan bambu, Peralatan dari logam, Barang-barang dari kain dan kulit, Peralatan kedokteran dan kesehatan, Peralatan laboratorium, instrumen optik, dan alat ukur, Alat musik dan peralatan studio, peralatan olahraga, barang-barang dari mineral nonlogam, barang-barang dari plastik, dsb.

A. Klasifikasi barang modal menurut lapangan usaha/sektor

Penggolongan ini memperlihatkan barang modal sebagai salah satu faktor produksi yang dimiliki dan dikuasai oleh sektor-sektor tersebut untuk melakukan kegiatan produksinya. Jenis dan ragam barang modal yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing sektor sangat tergantung pada jenis aktivitas produksi yang dilakukan. Sebagai contoh barang modal di sub-sektor peternakan dapat mencakup bangunan kantor, bangunan kandang, ternak penghasil, mesin pemerah susu, mesin penetas, kendaraan, dan lain-lain; Barang modal pada sub-sektor transportasi dapat mencakup bangunan kantor, bandara, pesawat terbang, kereta api, kendaraan roda empat, dan sebagainya.

B. Klasifikasi barang modal menurut institusi pemilik atau pelaku ekonomi

Institusi pemilik atau pelaku ekonomi pemilik atau penguasa barang modal terdiri dari :Pemerintah, BUMN/BUMD, Badan Usaha Swasta, Rumahtangga, Lembaga Nirlaba.

1. Pemerintah berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan umum baik di daerah maupun pusat. Pengeluaran pemerintah untuk barang modal meliputi pengeluaran untuk pembangunan gedung kantor, pembangunan rumah dinas, gedung sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, kendaraan dinas, komputer, dan lain-lain.
2. BUMN/BUMN dan Badan Usaha Swasta melakukan kegiatan Produksi baik barang maupun jasa . Penguasaan barang modal diantaranya bangunan kantor, lapangan terbang, kereta api, pesawat terbang, jaringan listrik, jaringan distribusi air, bangunan pabrik, gudang penyimpanan, peralatan kantor, mesin pabrik, kendaraan roda empat, dsb.
3. Rumahtangga sebagai rumahtangga murni menguasai barang modal berupa rumahtinggal. Namun sebagai rumah tangga usaha juga menguasai beberapa jenis barang modal yang digunakan dalam proses produksi.

4. Lembaga non profit dalam melakukan kegiatannya dapat menguasai barang modal jenis bangunan, kendaraan, peralatan kantor, peralatan peraga, dan sebagainya.

C. Klasifikasi Barang Modal Menurut Wilayah Asal barang

Penggolongan ini mengkategorikan wilayah asal barang yang dimiliki atau dikuasai berbagai lapangan usaha dan pelaku ekonomi didalam negeri., yang terbagi atas:

1. Produksi dalam negeri atau domestik, yaitu PMTB yang berasal dari barang modal baru produksi dalam negeri (wilayah domestik suatu negara), diantaranya meliputi bangunan, mesin-mesin, sarana transportasi, ternak, dan lain-lain.
2. Produksi negara lain (impor) yaitu PMTB yang berasal dari produksi luar negeri baik bekas maupun baru. Yang diantaranya meliputi mesin-mesin, sarana tranportasi, ternak, dan lain-lain.

2.4.4. Sumber Data

Sumber data PMTB diperoleh dari berbagai jenis survei yang dilaksanakan oleh BPS serta data sekunder lainnya dari Dinas/Instansi dai Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat maupun Provinsi Jawa Barat.

2.4.5. Metode Estimasi

Estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi produksi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal pada berbagai sektor produksi, atau disebut juga sebagai pendekatan “arus komoditi”. Penyediaan atau “*supply*” barang modal tersebut bisa berasal dari produk dalam negeri maupun produk luar negeri (impor).

a. Pendekatan secara langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, yang di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya untuk transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut. Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi/data tentang pembentukan modal tetap bruto (perubahan atas harta tetap, yang dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga pembelian (perolehan), pada setiap sektor. Untuk memperoleh nilai pembentukan modal atas dasar harga konstan, pembentukan modal (ADHB) tersebut di “deflate” dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar yang sesuai dengan masing-masing kelompok jenis barang modalnya.

b. Pendekatan secara tidak langsung

Penghitungan pembentukan modal dengan cara tidak langsung disebut juga sebagai pendekatan melalui arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatannya adalah dengan menghitung nilai produk barang yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (*supply*) yang kemudian dialokasikan sebagian menjadi barang modal. Estimasi penghitungan PMTB berupa bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output sektor konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

Estimasi penghitungan PMTB berupa mesin, angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor. Bagi barang modal yang berasal dari dalam negeri diperoleh dengan dua cara, yaitu pertama dengan mengalokasikan output mesin, angkutan serta barang modal lainnya yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan

sehingga diperoleh nilai PMTB atas dasar harga pembelian (ADHB). Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan mendeflate PMTB (ADHB) dengan IHPB yang sesuai dengan masing-masing jenis barang modal. Pendekatan kedua yang dapat dilakukan apabila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan nilai harga konstan dengan indeks produksi barang modal yang relevan. Untuk itu estimasi PMTB diawali dengan menghitung nilai harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh nilai berlakunya, nilai (ADHK) tersebut di “reflate” dengan menggunakan indeks harga masing-masing kelompok jenis barang modal sebagai inflatornya. Ini mensyaratkan bahwa nilai harga konstan pada tahun-tahun sebelumnya harus sudah tersedia secara lengkap.

2.5. Perubahan Stok

2.5.1. Konsep

Perubahan stok atau inventori merupakan persediaan barang (jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bermakna pertambahan (bertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

2.5.2. Cakupan

Pada prinsipnya perubahan inventori yang dicakup adalah persediaan barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara maupun input akhir.

2.5.3. Klasifikasi

Klasifikasi menurut jenis barang dapat dibedakan atas :

-
- a. Barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproses tapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
 - b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan yang di peroleh untuk di proses lebih lanjut menjadi barang jadi;
 - c. Barang setengah jadi,yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
 - d. Ternak untuk tujuan di potong;
 - e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
 - f. Pengadaan barang-barang oleh unit perdagangan untuk tujuan dijual atau di pakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
 - g. Stok pada pemerintah yang mencakup barang-barang strategis, seperti beras, kedelai, gula pasir,dan gandum.

2.5.4. Sumber Data

Sumber data perubahan inventori:

- a. Data komoditi pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- b. Data komoditas perkebunan;
- c. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait;
- d. Indeks harga implisit PDB sektoral terpilih,dan Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

2.5.5. Metode Estimasi

Metologi yang dapat digunakan dalam menghitung perubahan inventori ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) model pendekatan yakni dari sisi ”korporasi” atau unit usaha sebagai pendekatan “langsung” dan dari sisi ”komoditi” sebagai pendekatan tidak langsung. Dilihat dari sisi manfaatnya pendekatan secara langsung

akan menghasilkan data yang relatif lebih baik di bandingkan dengan pendekatan secara tidak langsung. Pendekatan komoditi hanya dapat dilakukan jika data tentang posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan. Proses penghitungan dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

a. Pendekatan Langsung

Dengan pendekatan langsung memungkinkan untuk diperoleh nilai posisi inventori pada waktu-waktu tertentu (biasanya akhir tahun). Sumber data utama yang dapat digunakan adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku maka diperlukan data inventori pada tahun-tahun yang berurutan. Langkah-langkah penghitungan perubahan inventori dari laporan keuangan, yaitu:

- Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan dengan mendeflate stok awal dan akhir persediaan dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangkan posisi inventori tahun t dengan tahun $t-1$; dan

Menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan menginflate perubahan inventori harga konstan dengan data IHPB rata-rata tahun.

b. Pendekatan tidak langsung

Pendekatan tidak langsung atau yang sering kali disebut juga dengan pendekatan arus komoditi (*kommodity flow*) . Data utama yang dibutuhkan adalah data tentang volume dan harga dari masing-masing barang inventori.

Nilai inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal barang inventori dikalikan rata-rata harga pembelian, atau rata-rata harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan inventori harga konstan dihitung dengan mendeflate nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang

sesuai, atau mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga tahun dasar.

Data mengenai nilai perubahan stok dalam komponen PDRB Kabupaten Bandung Barat masih merupakan perkiraan kasar, yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

2.6. Ekspor dan Impor

2.6.1. Konsep

Ekspor barang dan jasa merupakan suatu komponen dari permintaan akhir, tetapi impor merupakan sumber penyediaan barang dan jasa, oleh karena itu impor bukan merupakan komponen produksi dari total pengeluaran dalam PDRB.

Pembelian langsung di pasar suatu daerah oleh bukan penduduk termasuk ekspor barang dan jasa, serta pembelian di luar daerah oleh penduduk daerah tersebut dikategorikan sebagai impor. Yang tidak termasuk ekspor dan impor barang adalah barang milik penduduk atau bukan penduduk suatu daerah yang melintasi batas geografis suatu daerah karena merupakan tempat persinggahan.

Ekspor barang antar negara dinilai dengan harga *f.o.b. (free on board)*, sedangkan barang impor dinilai dengan harga *c.i.f (cost, insurance and freight)*. ekspor jasa dinilai pada saat jasa tersebut diberikan ke bukan penduduk, sedangkan impor jasa dinilai pada saat jasa diterima oleh penduduk. Penduduk yang dimaksud disini adalah lembaga pemerintah, perorangan, perusahaan swasta, perusahaan negara serta lembaga swasta non profil yang berada di daerah tersebut.

2.6.2. Cakupan

Cakupan transaksi ekspor-impor meliputi barang dan jasa. Transaksi ekspor impor barang dan jasa kabupaten/kota sama dengan cakupan transaksi ekspor-impor nasional ke luar negeri, yang membedakan hanya mitra transaksinya. Dalam ekspor-impor barang dan jasa nasional ke luar negeri, yang menjadi mitra adalah residen

luar negeri, sedangkan dalam ekspor-impor kabupaten/kota yang menjadi mitra adalah residen kabupaten/ kota lain di Indonesia dan luar negeri.

2.6.3. Klasifikasi

Ekspor dan impor barang dan jasa dapat diklasifikasi menurut wilayahnya menjadi 2 kelompok yaitu :

a. Antar Negara

Transaksi perdagangan antar-negara ini dicirikan melalui 2 (dua) aktivitas yang berawalan, disebut ekspor apabila produk barang dan jasa dikirim ke luar negeri (arus barang dan jasa dari unit residen pada unit non residen), sebaiknya disebut impor apabila produk tersebut masuk kedalam wilayah ekonomi domestic (arus barang dan jasa dari unit non residen pada unit residen). Konsep residen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu negara meliputi transaksi ekonomi yang di lakukan antar unit-unit institusi atau pelaku ekonomi suatu negara dengan unit-unit ekonomi negara lain.

b. Antar Daerah

Ekspor antar wilayah adalah arus masuk barang dan jasa suatu wilayah keluar wilayah-wilayah domestik lainnya (tidak termasuk transaksi dengan luar negeri). Sedangkan impor antar wilayah adalah arus masuk barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah-wilayah domestik lainnya.

2.6.4. Sumber Data

Data ekspor dan impor Kabupaten Bandung Barat masih sangat terbatas. Data ekspor dan impor diestimasi melalui berbagai survei yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Bandung Barat dan data sekunder lainnya.

2.6.5. Metode Estimasi

Penghitungan ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota dilakukan metode tidak langsung dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) komoditas barang dan jasa di setiap perekonomian di wilayahnya. Estimasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi arus barang dan jasa dari berbagai survey yang dilaksanakan oleh BPS maupun data sekunder lainnya.

Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa nasional ke luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota belum tersedia data yang sesuai dengan Konsep. Sumber data yang tersedia hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota menjadi sulit dilakukan secara langsung.

Asumsi yang digunakan dalam metode *commodity balance* adalah kelebihan dan kekurangan *supply* domestik terhadap *demand* sepenuhnya diselesaikan dengan ekspor dan impor. Apabila terjadi kelebihan *supply* domestik, maka akan mengekspor sedangkan kekurangan *supply* domestik akan mengimpor. Hal ini membuat hasil penghitungan ekspor-impor belum menangkap aspek lain dalam transaksi ekspor-impor, karena dalam kenyataannya baik dalam kondisi kelebihan atau kekurangan *supply* komoditas domestik, suatu kabupaten/kota dapat melakukan transaksi ekspor dan impor secara bersama-sama.

Nilai ekspor impor atas harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai ekspor dan impor atas harga berlaku dengan IHPB untuk ekspor dan impor.

BAB III

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KABUPATEN BANDUNG BARAT MENURUT PENGELUARAN

TAHUN 2016

Perekonomian Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari kondisi perekonomian regional Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pengaruh ekonomi global berpengaruh terhadap perekonomian di provinsi Jawa Barat. Perubahan-perubahan dunia luar turut mempengaruhi pola konsumsi, investasi, ekspor-impor dan perubahan stok di tingkat regional provinsi maupun regional kabupaten, termasuk perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Pada prinsipnya perkembangan perekonomian dalam hal ini indikator makro ekonomi yang digunakan adalah PDRB, selain ditinjau dari sisi lapangan usaha atau sektoral juga akan semakin lengkap jika ditinjau dari sisi pengeluarannya. PDRB menurut pengeluaran menggambarkan pengeluaran barang dan jasa yang di produksi oleh berbagai sektor dalam masyarakat di suatu wilayah.

3.1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran

Seperti halnya PDRB menurut lapangan usaha, PDRB menurut pengeluaran dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (tahun 2010). Dalam hal ini PDRB Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam periode 2014 – 2016. Komponen pengeluaran dibedakan atas pengeluaran konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga non profit, konsumsi pemerintah, pembentukan barang modal tetap bruto (PMTB), perubahan stok dan net ekspor.

Selama periode 2014 – 2016 pengeluaran konsumsi rumahtangga merupakan pengeluaran yang terbesar dari struktur PDRB pengeluaran dengan nilai sebesar 19,637,442.5 juta rupiah pada tahun 2014 dan terus bertambah menjadi 24,402,787.9 juta rupiah pada tahun 2016. Peningkatan daya beli masyarakat dan

pertumbuhan penduduk menjadi aspek yang paling dominan dalam peningkatan konsumsi rumah tangga. Secara faktual konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh pengeluaran berupa makanan. Meskipun fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi bukan makanan menunjukkan tren meningkat.

Peningkatan konsumsi RT untuk pendidikan, kesehatan, perumahan dan kebutuhan sekunder lainnya tumbuh selaras dengan peningkatan daya beli dan perubahan perilaku konsumsi dan gaya hidup terutama masyarakat di wilayah perkotaan. Hal ini mendorong para produsen untuk meningkatkan produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas yang pada gilirannya juga akan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

<http://bandungbaratkab.bps.go.id>

Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 – 2016 (Juta Rp)

U R A I A N	2014	2015*	2016**
(1)	[2]	[3]	[4]
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	19,637,442.5	21,796,493.2	24,402,787.9
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	319,965.6	303,483.0	322,972.7
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,077,822.6	2,548,520.0	2,784,879.0
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,478,924.5	7,307,419.6	7,767,624.9
5. Perubahan Stock	1,515,405.1	1,377,681.8	1,448,340.9
6. Ekspor Netto	650,437.3	676,024.1	185,813.6
P D R B	30,679,997.7	34,009,621.7	37,084,118.9

Ket. *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pengeluaran konsumsi lembaga non profit dalam konteks ini adalah Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRRT) adalah lembaga formal maupun informal yang di bentuk atau dibiayai oleh perorangan, memberikan andil yang terkecil terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2014 pengeluaran konsumsi lembaga non profit hanya mencapai 319,965.6 juta rupiah. Diprediksi pergerakan komponen ini akan lebih melaju pada tahun depan karena terdorong oleh aktivitas organisasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten Bandung Barat. Terbukti pada tahun 2016 Ekspor netto menjadi yang terkecil yaitu 185,813.6 juta rupiah.

Pengeluaran konsumsi pemerintahan pada tahun 2014 mencapai 2,077,822.6 terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 mencapai 2,784,879.0 juta rupiah. Pengeluaran konsumsi pemerintahan didefinisikan sebagai nilai output atas pelayanan pemerintah dikurangi dengan nilai penjual barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang kegiatannya yang tidak dapat dipisahkan. Output pemerintah tidak dijual sehingga nilainya diukur dengan biaya produksinya, yaitu jumlah konsumsi antara, konsumsi pegawai, konsumsi modal tetap dan pajak tak langsung. Pengeluaran pemerintah meliputi pengeluaran Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Desa) dan Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Untuk melihat perkembangan investasi, proxy yang dapat dilakukan adalah dengan melihat perkembangan pembentukan barang modal tetap bruto (PMTB). Selama periode 2014 – 2016 PMTB di Kabupaten Bandung Barat juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 6,478,924.5 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 7,767,624.9 juta rupiah pada tahun 2016. Dilihat dari institusi pelaku PMTB terbagi empat yaitu : Swasta, rumah tangga, BUMN dan BUMD serta Pemerintah. Dengan demikian selain para investor swasta, pemerintah diharapkan dapat memperbesar porsi pengeluarannya untuk barang modal. Belanja pemerintah dalam bentuk barang modal (terutama infrastruktur) menjadi stimulus yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi. Bagi investor swasta, iklim investasi yang baik sangat diperlukan yaitu antara lain adalah aspek regulasi pada investasi, peraturan ketenagakerjaan, UMR, tersedianya infrastruktur yang memadai, kemudahan birokrasi dan tingkat keamanan wilayah.

Perubahan stok menjadi cukup penting dalam struktur ekonomi terutama setelah adanya *rush* dan berbagai krisis pangan akan mempengaruhi stabilitas harga secara keseluruhan. Harga yang tidak stabil serta distribusi penjualan yang terganggu menyebabkan terganggunya konsumsi rumah tangga, lebih jauh akan berpengaruh terhadap kestabilan sosial masyarakat. Pengaruh Nasional dan Regional secara langsung maupun tidak langsung turut mewarnai ekonomi Kabupaten Bandung Barat pada faktor ”*demand*”. Perubahan stok di Kabupaten Bandung

Barat periode 2014 – 2016 relatif tidak terlalu berubah secara signifikan, dan tetap terjaga pada level dibawah 5 persen dari seluruh nilai tambah yang terbentuk pada seluruh sisi produksi ekonomi. Secara nominal perubahan stok pada tahun 2016 mencapai 1,448,340.9 juta rupiah.

Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 – 2016 (Juta Rp)

U R A I A N	2014	2015*	2016**
(1)	[2]	[3]	[4]
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	15,499,548.0	16,237,532.9	17,236,454.2
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	269,182.7	244,899.9	254,842.9
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,578,814.1	1,722,011.3	1,797,931.0
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,168,962.8	5,529,702.3	5,775,311.6
5. Perubahan Stock	1,122,527.2	930,791.8	943,131.8
6. Ekspor Netto	625,887.6	821,232.6	914,961.8
P D R B	24,264,922.5	25,486,170.8	26,922,633.2

Ket. *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Ekspor barang dan jasa merupakan suatu komponen dari permintaan akhir, sedangkan impor merupakan sumber penyediaan barang dan jasa, oleh karena itu impor bukan merupakan produksi dari total pengeluaran dalam PDRB. Dalam hal ini nilai impor harus dikeluarkan dari sisi pengeluaran. Informasi data impor dan ekspor di Kabupaten Bandung Barat masih sangat lemah. Dengan sistem ekonomi terbuka dimana arus barang dan jasa dengan mudah keluar dan masuk Kabupaten

Bandung Barat menyebabkan data dan informasi tidak terdeteksi dengan baik. Namun dengan melakukan berbagai pendekatan dan menghimpun data ekspor dan impor dari berbagai survei maka diperoleh ekspor neto periode 2014 – 2016 seperti yang disajikan pada tabel 3.2. ekspor neto pada tahun 2016 mencapai 914,961.8 juta rupiah. Pada komponen ini terkandung juga selisih statistik (*Statistical Discrepance*) yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

Secara riil perkembangan PDRB menurut pengeluaran dilihat berdasarkan atas dasar harga konstan. Dalam hal ini pengaruh peningkatan pengeluaran karena pengaruh harga dihilangkan terlebih dahulu. Besarnya pengeluaran atau pengeluaran pada masing-masing jenis pengeluaran atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 3.2.

3.2. Struktur Pengeluaran

Struktur pengeluaran oleh komponen permintaan akhir terlihat pada tabel 3.3. dimana pengeluaran konsumsi rumahtangga masih menjadi komponen terbesar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan kontribusinya sebesar 65.80 persen pada tahun 2016. Persentase distribusi komponen ini cenderung mengalami peningkatan selama periode 2014 – 2016, dimana pada tahun 2014 kontribusi pengeluaran konsumsi RT masih mencapai 64,01 persen.

Sejalan dengan pergerakan dan pertumbuhan produksi yang semakin meningkat pada berbagai sektor, pergeseran kontribusi pengeluaran pun mulai terlihat. Pengeluaran konsumsi pemerintah berupa output atas pelayanan publik setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan pertumbuhan investasi yang dalam konteks ini adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami fluktuasi, dari tahun 2014 meningkat di tahun 2015 namun kembali menurun pada tahun 2016. Selama periode 2014 – 2016 andil pengeluaran pemerintah dan PMTB terhadap PDRB menurut pengeluaran meningkat dari 6,77 persen dan 21,12 persen (2014) menjadi 7,51 persen dan 20,95 persen pada tahun 2016.

**Tabel 3.3. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2014 – 2016 (Persen)**

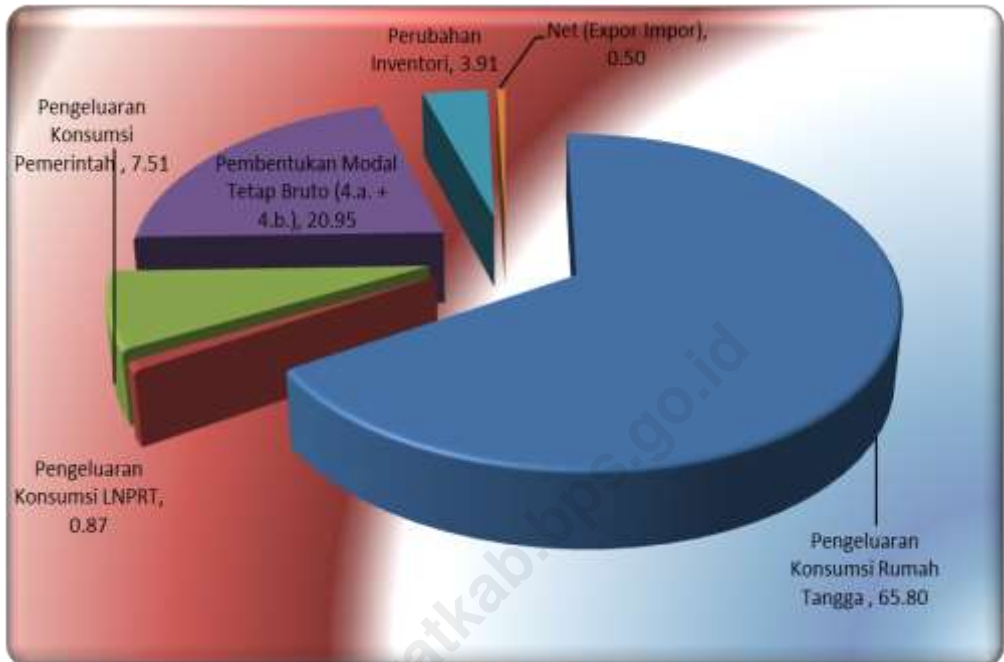
U R A I A N	2014	2015*	2016**
(1)	[2]	[3]	[4]
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	64.01	64.09	65.80
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	1.04	0.89	0.87
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.77	7.49	7.51
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	21.12	21.49	20.95
5. Perubahan Stock	4.94	4.05	3.91
6. Ekspor Netto	2.12	1.99	0.50
P D R B	100.00	100.00	100.00

Ket. *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sejauh ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat masih ditopang oleh komponen konsumsi dimana kontribusinya masih mempunyai andil yang sangat dominan. Sesungguhnya motor pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal. Oleh karena itu komponen pembentukan modal tetap bruto semestinya harus lebih dipacu.

Gambar 3.1. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2016 (Persen)**



Ket. *) Angka Sementara

Kontribusi komponen pengeluaran terhadap PDRB terlihat pada gambar 3.1. dimana kontribusi pengeluaran konsumsi RT, PMTB, pengeluaran konsumsi pemerintah dan perubahan inventori/stok masing-masing sebesar 65,80 persen, 20,95 persen, 7,51 persen dan 3,91 persen. Sedangkan andil pengeluaran konsumsi lembaga non profit dan net expor sebesar 0,87 persen dan 0,50 persen.

3.3. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menurut pengeluaran secara total sama dengan LPE PDRB menurut lapangan usaha yaitu mencapai 5,64 persen pada tahun

2016. Pertumbuhan ekonomi ini digerakkan oleh pertumbuhan positif dari semua komponen pengeluaran.

Pengeluaran konsumsi rumahtangga pada tahun 2016 naik menjadi 6,15 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan pengeluaran konsumsi RT ini didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu kemudahan terhadap akses Bank dalam pengucuran dana untuk konsumsi yang relatif mudah dan terbuka, menjadi salah satu penyebab pertumbuhan komponen ini.

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 – 2016 (Persen)

U R A I A N	2014	2014	2016*
(1)	[2]	[3]	[4]
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4.57	4.76	6.15
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	6.44	-9.02	4.06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.14	9.07	4.41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.46	6.98	4.44
5. Perubahan Stock	4.39	-17.08	1.33
6. Ekspor Netto	27.59	31.21	11.41
P D R B	5.79	5.03	5.64

Ket. *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada komponen net ekspor, PMTB dan pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan sebesar 11,41 persen, 4,44 persen dan 4,41 persen. Kondisi ini memberikan sinyal yang cukup baik bagi perekonomian Kabupaten Bandung Barat. PMTB yang dibentuk dapat berupa bangunan, mesin, kendaraan atau perlengkapan lainnya. Pada dasarnya korelasi antara penambahan/pertumbuhan nilai tambah bruto sektoral sangat besar dengan pembentukan modal / investasi yang ditanamkan. Korelasi antara keduanya dikenal dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR menunjukkan laju pertumbuhan relatif akibat adanya investasi. Dengan ICOR dapat diketahui tingkat efisiensi pengeluaran modal terhadap penambahan nilai tambah bruto atau terhadap pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 4,41 persen pada tahun 2016. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut pada dasarnya menunjukkan peningkatan pembiayaan kegiatan pelayanan publik yang hasil dan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Selama periode 2014 – 2016 pengeluaran komponen ini terus meningkat. Pemerintah secara nominal terus memperbesar anggaran belanja baik melalui APBD maupun APBN.

Komponen perubahan stok (Inventori) mengalami pertumbuhan 1,33 persen pada tahun ini. Selama periode 2014 – 2016 besarnya pertumbuhan komponen ini bervariasi, pada tahun 2014 mengalami percepatan kemudian pada tahun 2015 mengalami perlambatan, dan 2016 kembali mengalami pertumbuhan positif. Inventori ini merupakan salah satu pendukung utama dalam proses produksi. Monitoring terhadap stok mutlak diperlukan agar proses produksi tetap berjalan dengan baik. Stok (inventori) pada dasarnya dapat berupa bentuk bahan baku, bahan jadi, bahan setengah jadi dan bahan penolong. Stok berupa bahan jadi/produksi yang belum terjual secara mikro diperlukan dan dijaga untuk menghindari kelangkaan barang yang berdampak pada kenaikan harga, atau pada komoditas pangan dapat menyebabkan krisis pangan. Namun penumpukan stok juga berdampak negatif, secara ekonomi menjadi tidak efisien. Selama periode 2014 –

2016 perubahan stok di Kabupaten Bandung Barat berada dibawah 5 persen dari total PDRB.

Komponen terakhir adalah net ekspor, dimana pada tahun 2016 mampu tumbuh sebesar 11,41 persen. Selama periode 2014 – 2016, komponen ini mengalami percepatan yang sangat signifikan. Sejalan dengan perkembangan infrastruktur dan sarana teknologi komunikasi yang semakin meningkat memberikan efek positif terhadap aktivitas perdagangan antar wilayah, baik secara langsung maupun secara *on line* Dengan potensi perekonomian yang didominasi oleh sektor industri, perdagangan/hotel/restoran dan pertanian Kabupaten Bandung Barat berpeluang besar dalam meningkatkan produk ekspor bukan hanya memasok pasar domestik ke luar Kabupaten Bandung Barat tetapi juga menembus pasar luar negeri. Namun perlu dicermati bahwa andil dari komponen net export sangat kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat yaitu masih dibawah 2 persen. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah khususnya untuk lebih meningkatkan expor baik sektor industri, perdagangan, hotel/restoran dan pertanian.

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2010 – 2016 (Juta Rp)**

U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	13.243.012,9	14.383.715,4	15.778.637,0	17.780.048,9	19.637.442,5	21.796.493,2	24.402.787,9
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5.952.686,2	6.530.612,0	7.301.173,7	8.373.183,5	9.472.669,4	10.571.307,2	12.246.164,4
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	585.301,1	625.955,7	694.166,9	757.346,5	785.276,1	872.438,6	932.534,7
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2.513.169,6	2.638.705,5	2.819.281,8	3.186.900,9	3.378.093,6	3.746.892,0	4.088.731,7
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	486.120,3	521.086,6	552.167,2	609.034,6	671.972,8	748.089,2	812.513,8
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	2.517.684,1	2.753.463,3	2.947.683,8	3.223.592,7	3.602.282,3	4.020.965,2	4.329.939,0
1.f. Hotel dan Restoran	618.204,5	658.893,0	719.168,2	799.509,9	846.736,2	882.852,5	963.611,0
1.g. Lainnya	569.847,1	654.999,3	744.995,4	830.480,8	880.412,1	953.948,5	1.029.293,2
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	229.568,4	237.644,1	249.433,7	288.621,4	319.965,6	303.483,0	322.972,7
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.407.510,8	1.540.620,3	1.759.702,3	1.927.192,9	2.077.822,6	2.548.520,0	2.784.879,0
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.940.931,5	4.440.610,4	5.091.315,0	5.627.072,2	6.478.924,5	7.307.419,6	7.767.624,9
P D R B	19.322.131,5	21.337.025,8	24.144.338,5	27.382.963,4	30.679.997,7	34.009.621,7	37.084.118,9

Ket. *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2010 – 2016 (Juta Rp)**

U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	13.243.012,9	13.778.000,9	14.276.716,6	14.822.080,2	15.499.548,0	16.237.532,9	17.236.454,2
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5.952.686,2	6.188.153,4	6.391.774,3	6.604.766,9	7.006.695,6	7.415.536,0	7.932.264,3
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	585.301,1	609.124,1	652.391,5	690.398,2	702.076,7	738.781,3	779.059,6
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2.513.169,6	2.583.146,2	2.623.796,1	2.719.860,5	2.767.419,3	2.854.361,4	3.013.810,3
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	486.120,3	509.761,4	524.882,4	563.300,2	594.981,0	632.015,9	653.927,1
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	2.517.684,1	2.613.163,0	2.730.422,2	2.834.315,0	2.973.396,8	3.086.066,5	3.270.663,5
1.f. Hotel dan Restoran	618.204,5	645.430,8	671.715,6	704.858,9	717.207,3	739.223,8	801.156,1
1.g. Lainnya	569.847,1	629.222,0	681.734,5	704.580,5	737.771,3	771.547,9	785.573,4
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	229.568,4	232.174,5	237.505,8	252.896,2	269.182,7	244.899,9	254.842,9
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.407.510,8	1.442.434,3	1.516.406,3	1.530.710,8	1.578.814,1	1.722.011,3	1.797.931,0
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.940.931,5	4.280.216,9	4.659.327,5	4.765.591,0	5.168.962,8	5.529.702,3	5.775.311,6
P D R B	19.322.131,5	20.419.114,5	21.651.879,0	22.937.169,4	24.264.922,5	25.486.170,8	26.922.633,2

Ket. *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2010 – 2016 (Persen)

U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	68,54	67,41	65,35	64,93	64,01	64,09	65,80
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	30,81	30,61	30,24	30,58	30,88	31,08	33,02
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,03	2,93	2,88	2,77	2,56	2,57	2,51
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,01	12,37	11,68	11,64	11,01	11,02	11,03
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,52	2,44	2,29	2,22	2,19	2,20	2,19
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	13,03	12,90	12,21	11,77	11,74	11,82	11,68
1.f. Hotel dan Restoran	3,20	3,09	2,98	2,92	2,76	2,60	2,60
1.g. Lainnya	2,95	3,07	3,09	3,03	2,87	2,80	2,78
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	1,19	1,11	1,03	1,05	1,04	0,89	0,87
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,28	7,22	7,29	7,04	6,77	7,49	7,51
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,40	20,81	21,09	20,55	21,12	21,49	20,95
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket. *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2010 – 2016 (Persen)

U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	68,54	67,48	65,94	64,62	63,88	63,71	64,02
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	30,81	30,31	29,52	28,80	28,88	29,10	29,46
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,03	2,98	3,01	3,01	2,89	2,90	2,89
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,01	12,65	12,12	11,86	11,41	11,20	11,19
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,52	2,50	2,42	2,46	2,45	2,48	2,43
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	13,03	12,80	12,61	12,36	12,25	12,11	12,15
1.f. Hotel dan Restoran	3,20	3,16	3,10	3,07	2,96	2,90	2,98
1.g. Lainnya	2,95	3,08	3,15	3,07	3,04	3,03	2,92
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	1,19	1,14	1,10	1,10	1,11	0,96	0,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,28	7,06	7,00	6,67	6,51	6,76	6,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,40	20,96	21,52	20,78	21,30	21,70	21,45
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket. *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2010 – 2016 (Persen)

U R A I A N	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	8,61	9,70	12,68	10,45	10,99	11,96
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,71	11,80	14,68	13,13	11,60	15,84
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6,95	10,90	9,10	3,69	11,10	6,89
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,00	6,84	13,04	6,00	10,92	9,12
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,19	5,96	10,30	10,33	11,33	8,61
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	9,36	7,05	9,36	11,75	11,62	7,68
1.f. Hotel dan Restoran	6,58	9,15	11,17	5,91	4,27	9,15
1.g. Lainnya	14,94	13,74	11,47	6,01	8,35	7,90
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	3,52	4,96	15,71	10,86	-5,15	6,42
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,46	14,22	9,52	7,82	22,65	9,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,68	14,65	10,52	15,14	12,79	6,30
P D R B	10,43	13,16	13,41	12,04	10,85	9,04

Ket. *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2010 – 2016 (Persen)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4,04	3,62	3,82	4,57	4,76	6,15
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,96	3,29	3,33	6,09	5,83	6,97
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,07	7,10	5,83	1,69	5,23	5,45
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,78	1,57	3,66	1,75	3,14	5,59
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,86	2,97	7,32	5,62	6,22	3,47
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	3,79	4,49	3,81	4,91	3,79	5,98
1.f. Hotel dan Restoran	4,40	4,07	4,93	1,75	3,07	8,38
1.g. Lainnya	10,42	8,35	3,35	4,71	4,58	1,82
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	1,14	2,30	6,48	6,44	-9,02	4,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,48	5,13	0,94	3,14	9,07	4,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,61	8,86	2,28	8,46	6,98	4,44
P D R B	5,68	6,04	5,94	5,79	5,03	5,64

Ket. *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2010 – 2016 (Persen)

U R A I A N	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	104,40	110,52	119,96	126,70	134,24	141,58
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	105,53	114,23	126,77	135,19	142,56	154,38
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	102,76	106,40	109,70	111,85	118,09	119,70
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	102,15	107,45	117,17	122,07	131,27	135,67
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	102,22	105,20	108,12	112,94	118,37	124,25
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	105,37	107,96	113,73	121,15	130,29	132,39
1.f. Hotel dan Restoran	102,09	107,06	113,43	118,06	119,43	120,28
1.g. Lainnya	104,10	109,28	117,87	119,33	123,64	131,02
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	102,36	105,02	114,13	118,87	123,92	126,73
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	106,81	116,04	125,90	131,61	148,00	154,89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	103,75	109,27	118,08	125,34	132,15	134,50
P D R B	104,50	111,51	119,38	126,44	133,44	137,74

Ket. *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2010 – 2016 (Persen)

U R A I A N	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4,40	5,87	8,54	5,62	5,95	5,47
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,53	8,24	10,98	6,64	5,45	8,30
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,76	3,54	3,10	1,96	5,58	1,36
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,15	5,19	9,05	4,18	7,54	3,35
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,22	2,91	2,78	4,46	4,80	4,97
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	5,37	2,46	5,35	6,52	7,55	1,61
1.f. Hotel dan Restoran	2,09	4,88	5,94	4,08	1,16	0,71
1.g. Lainnya	4,10	4,98	7,86	1,24	3,61	5,97
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	2,36	2,60	8,67	4,15	4,25	2,27
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,81	8,65	8,49	4,53	12,45	4,66
4. Pembentukan M Tetap Bruto	3,75	5,32	8,06	6,15	5,43	1,78
P D R B	4,50	6,71	7,06	5,91	5,54	3,22

Ket. *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung Barat**

Jalan Raya Padalarang No. 763 Padalarang, Bandung Barat 40553
Telp. (022) 680 4400, Faks. (022) 680 4411, Email : bps3217@bps.go.id